SEKNAS FITRA

LPEM FEB UI
UNIVERSITAS INDONESIA

From the People of Japan

UNDP

Kerangka Kerja Monitoring & Evaluasi Inisiatif Pemulihan Hijau Pasca Pandemi di Daerah

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iii
GLOSARIUM iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN 3
1.3 LINGKUP 3
1.4 PENGGUNA 3
1.5 METODE MONITOR DAN EVALUASI 3
BAB II 4
KERANGKA PEMULIHAN HIJAU 4
2.1 DEFINISI PEMULIHAN HIJAU 4
2.2 URGENSI PEMULIHAN HIJAU 5
2.3 REGULASI TERKAIT PEMULIHAN HIJAU 8
2.4 PENGGUNAAN KERANGKA PEMULIHAN HIJAU 9
2.5 PENYUSUNAN PETA JALAN PEMULIHAN HIJAU DAERAH 11
2.5.1 Penentuan sektor prioritas 11
2.5.2 Potensi Penerimaan dari Sektor Prioritas 14
2.6 KONTEKS DAERAH PILOTING MONITOR DAN EVALUASI PEMULIHAN HIJAU 15
BAB III 24
KERANGKA MONITORING DAN EVALUASI PEMULIHAN HIJAU DAERAH 24
3.1 OPERASIONALISASI KERANGKA MONITOR DAN EVALUASI PEMULIHAN HIJAU DI DAERAH 24
3.2 KERANGKA ANALISIS MONEV PEMULIHAN HIJAU 27
3.3 TAHAPAN DAN KERANGKA WAKTU MONEV PEMULIHAN HIJAU 28
3.4 PANDUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMULIHAN HIJAU 29
3.4.1 Tahap Persiapan 29
3.4.2 Tahap Pelaksanaan 32
SUMBER DOKUMEN 34
LAMPIRAN 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Dampak COVID-19 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6
Tabel 2.2. Tahapan Kerangka Pemulihan Hijau 10
Tabel 2.3 Contoh Indikator dan Variabel dalam Analisis MCDA 12
Tabel 2.4 Contoh Indikator dan Bobot untuk Provinsi Riau 13
Tabel 2.5 Contoh Hasil MCDA Provinsi Riau 13
Tabel 2.6 Konteks Daerah Provinsi Riau 16
Tabel 2.7 Konteks Daerah Provinsi Jawa Barat 18
Tabel 2.8 Konteks Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 20
Tabel 2.9 Konteks Daerah Provinsi NTB 22
Tabel 3.1 Resume teknik utama pengumpulan data/informasi 27
Tabel 3.2 Kerangka Waktu Monev Pemulihan Hijau Daerah 29
Tabel 3.3 Contoh Kerangka Analisis untuk Dimensi Proses 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemulihan Hijau 9
Gambar 2.2 Tahapan Implementasi Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) 11
Gambar 2.3 Metode Estimasi Pendapatan Pemerintah Daerah 14
Gambar 2.4 Potensi Tambahan Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial di Provinsi Riau Sebelum (BAU) dan Saat Transisi 15
Gambar 3.1 Sistematika Operasionalisasi Kerangka Monev 24
Gambar 3.2 Bagan Kerangka Monev Pemulihan Hijau Daerah 26
Gambar 3.3 Bagan Tahapan kegiatan Monev Pemulihan Hijau Daerah 28

GLOSARIUM

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAU	Business as Usual
BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
DAS	Daerah Aliran Sungai
DESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
EBT	Energi Baru Terbarukan
FGD	Focus Group Discussion
GRK	Gas Rumah Kaca
KEMEN LHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KEMEN PPN BAPPENAS	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona
KEMENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri
LCDI	Low Carbon Development Indonesia
LTS-LCCR	*Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience*
MCDA	Multi-criteria Decision Analysis
MONEV	Monitoring dan Evaluasi
NDC	*Nationally Determined Contribution*
NDC	Nationally Determined Contribution
NZE	Net Zero Emission
OMS	Ogranisasi Masyarakat Sipil
OMS	Organisasi Perangkat Daerah
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto

PEMDA	Pemerintah Daerah
PEMPUS	Pemerintah Pusat
PERPERS	Peraturan Presiden
PH	Pemulihan Hijau
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
POKMAS	kelompok masyarakat
PT	Perguruan Tinggi
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
SDGS	Sustainable Deveopment Goals
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKD	Transfer ke Daerah
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UNDP	United Nations Development Programme
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
WKP	Wilayah Kerja Pertambangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi hijau berupaya mengurangi atau menghindari biaya-biaya kerusakan lingkungan untuk mencapai pertumbuhan yang adil dan merata.[1] Komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi hijau telah tertuang dalam komitmen nasional dan global. Untuk konteks nasional sejumlah butir NAWACITA mengamanatkan aksi tentang penguatan sektor kehutanan, serta membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan (RPJPN 2005-2025).[2] Untuk konteks global, komitmen Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi hijau berkontribusi pada capaian *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs), *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Dokumen *Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* 2021 (LTS-LCCR 2021)[3] dimana Indonesia berencana mencapai *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Meskipun demikian, jika melihat alokasi anggaran untuk perubahan iklim pada tahun 2018 dan 2019 trennya mengalami penurunan dan puncaknya pada tahun 2020. Sejumlah kebijakan realokasi dan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat pandemi COVID19 pada tahun 2020 berdampak pada penurunan anggaran perubahan iklim menjadi Rp 77,81 triliun atau setara 41% dari anggaran perubahan iklim pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 132,47 triliun.[4] Sehingga untuk mendorong inisiasi ekonomi hijau maka perlu membuat program transisi pemulihan hijaun yang lintas sektor dan lintas kemitraan.

Pemulihan hijau tidak hannya menjadi tugas Pemerintah Pusat (Pempus) tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda). Namun demikian, berbagai tantangan dihadapi pemda dalam menjalankan program pengendalian perubahan iklim antara lain;

1. Ketidaksetaraan pemahaman risiko perubahan iklim diantara pemangku kepentingan daerah
2. Ketiadaan perencanaan matang untuk program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Pendanaan program lingkungan hidup yang dilihat sebagai "*cost*" bukan investasi
4. Kebergantungan anggaran yang tinggi terhadap transfer dari pusat, dan
5. Proporsi anggaran belanja untuk lingkungan hidup yang masih sangat minim.

---

[1] Ringkasan eksekutif, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. 2018. http://greengrowth.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/20160510161543.Roadmap_Executive-_Summary_ID.pdf

[2] Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution), Oktober 2017.

[3] Merupakan strategi jangka panjang yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku *national focal point* untuk *United Nations Climate Change Conference* (UNFCCC) sebagai upaya memenuhi mandat Persetujuan Paris.

[4] Dokumen APBN, sumber DJA Kemenkeu. Data olah Fitra. 2023.

Tantangan semakin besar di tengah pandemi COVID-19 yang membuat keseimbangan anggaran daerah bergeser. Upaya *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan Pemda sepanjang tahun 2020-2021 untuk penanggulangan COVID-19 mengorbankan anggaran yang diperlukan untuk kepentingan jangka panjang, termasuk anggaran untuk mendukung pendanaan perubahan iklim. Di dalam struktur APBD 2021, proporsi alokasi anggaran belanja untuk lingkungan hidup hanya sekitar 3% jika dibandingkan dengan pos belanja lainnya seperti pendidikan (34%), pelayanan umum (32%), kesehatan (11%), dan ekonomi (11%).

Inisiatif Pemulihan hijau dapat memainkan peran penting dalam rangka pemulihan pasca pandemi sekaligus sebagai transisi menuju ekonomi hijau. Inisiatif pemulihan hijau memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk keluarga berpendapatan rendah dan menengah, dan pada sisi yang lain lebih baik untuk lingkungan, terutama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan kota sehat. Ia tidak hanya membangkitkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengurangi ketergantungan karbon, melindungi ekosistem dan menurunkan kemiskinan.

Di tengah berbagai usaha untuk memperkuat dan memandu inisiatif pemulihan hijau nasional, Melalui Program RESTORE (*Response Toward Resilience*) *United Nations Development Programme* (UNDP-Indonesia) bekerja sama dengan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) ingin berkontribusi untuk memastikan inisiatif pemulihan hijau pasca pandemi menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sekaligus memastikan adanya sumber pendanaan tersedia untuk keberlanjutan pengembangan ekonomi hijau di daerah. Salah satunya dengan mengembangkan Kerangka transisi pasca pandemi dari kondisi BAU (*Business as Usual*) ke Ekonomi Hijau yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk memandu penyusunan rencana dan implementasi yang jauh lebih relevan dengan mem-pertimbangkan kondisi setiap daerah. Kerangka ini disusun dengan mengambil pilot pada empat provinsi yakni Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat. Sejalan dengan itu, program ini juga bertujuan mengembangkan Kerangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inisiatif Pemulihan Hijau di daerah yang diharapkan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam memantau dan mengevaluasi implementasi inisiatif pemulihan hijau di daerah.

1.2 TUJUAN

Tujuan Monitoring dan Evaluasi inisiatif pemulihan hijau di daerah adalah untuk:

a. Mengetahui perkembangan dan capaian inisiatif pemulihan hijau di daerah pada dimensi kebijakan pemulihan hijau, integrasi kebijakan dengan perencanaan jangka menengah daerah, implementasi kegiatan pemulihan hijau dan *outcome* inisiatif pemulihan hijau
b. Mengembangkan dialog kebijakan multipihak dan memperkuat kemitraan masyarakat dan pemerintah dalam implementasi pemulihan hijau di daerah
c. Memperoleh masukan untuk perbaikan peta jalan pemulihan hijau dan RPJMD.

1.3 LINGKUP

Kerangka ini digunakan dalam lingkup terbatas hanya untuk menilai sejauhmana inisiatif hijau yang diimplementasikan di tingkat daerah telah merujuk pada kerangka yang disarankan oleh kerangka kerja Monev ini. Atau, dalam bahasa lain sejauhmana insiatif pemulihan hijau di daerah memiliki relevansi dengan konteks, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing provinsi *piloting*.

1.4 PENGGUNA

Kerangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini disusun untuk rencana pengguna meliputi semua *stakeholders* pemulihan hijau di daerah, baik Pemda, Ogranisasi Masyarakat Sipil (OMS), sektor swasta dan komunitas (kelompok masyarakat).

Sementara untuk tujuan perluasan penggunaan, Kerangka Monev ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi kementerian terkait misal; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemen Dagri), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) dalam mendorong dan memandu kegiatan pemulihan hijau di daerah.

1.5 METODE MONITOR DAN EVALUASI

Untuk mencapai tujuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang telah ditentukan, maka Monev diharapkan dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan mengupayakan keterlibatan semua *stakeholders* terkait mulai dari pemerintah, sektor swasta, Organisasi Masyarkat Sipil (OMS) dan kelompok masyarakat (komunitas). Metode analisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif mengenai perkembangan dan capaian inisiatif pemulihan hijau.

Teknik pengumpulan data merupakan kombinasi dari beberapa teknik, karena menyesuaikan dengan kebutuhan data/informasi untuk setiap aspek yang akan diperdalam pada setiap dimensi. Teknik pengumpulan data/informasi utama meliputi *Desk study* atau penelitian meja[5] dan wawancara (kepada *stakeholders* umum dan sektoral).

[5] *Desk study* adalah metode penelitian yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada. Data yang ada diringkas dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan

BAB II
KERANGKA PEMULIHAN HIJAU

2.1 DEFINISI PEMULIHAN HIJAU

Pemulihan hijau merujuk pada konsep pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam upaya memulihkan ekosistem yang rusak dan menciptakan kehidupan yang lebih berkelanjutan.[6]

Pemulihan hijau melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah mencapai kesinambungan ekonomi jangka panjang dengan mempertimbangkan kesejahteraan manusia dan pelestarian alam. Beberapa prinsip utama pemulihan hijau meliputi:

a. **Penggunaan Energi Terbarukan** Beralih dari sumber energi fosil yang terbatas dan berdampak besar terhadap lingkungan ke sumber energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan hidro. Ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
b. **Konservasi Sumber Daya Alam** Melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada, termasuk hutan, perairan, dan tanah. Ini melibatkan perlindungan terhadap deforestasi, penebangan liar, dan eksploitasi berlebihan sumber daya alam.
c. **Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan** Mengembangkan dan menerapkan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam, seperti teknologi hemat energi dan proses produksi yang berkelanjutan.
d. **Peningkatan Efisiensi Energi** Mengurangi konsumsi energi dengan meningkatkan efisiensi dalam sektor-sektor seperti industri, transportasi, dan bangunan. Ini dapat mencakup penggunaan peralatan hemat energi, pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan, dan perancangan bangunan yang ramah lingkungan.
e. **Pemberdayaan Masyarakat** Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat berarti memberikan akses yang adil dan kesempatan bagi semua orang untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan hijau dan menikmati manfaatnya.

[6] Dokumen PDF bahan Kemen PPN/Bappenas RI: Green Recovery Roadmap Indonesia 2021–2024, Building Back Better Low Carbon Development Post-Covid19. Diakses pada Maret 2023.

Penjelasan diatas sejalan dengan beberapa difinisi Pemulihan Hijau menurut lembaga internasional, antara lain:

"Suatu rangkaian strategi yang memfasilitasi perubahan yang berkelanjutan, tangguh, dan netral iklim dengan tujuan untuk memulihkan keadaan sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan krisis COVID-19." *(Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit - Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ)*

"Inisiatif pemulihan dari dampak COVID-19 yang mampu mendorong negara-negara untuk pulih dan kembali dengan kondisi lebih baik, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif" *(United Nations Environment Programme - UNEP)*

"Respon kebijakan terhadap dampak krisis COVID-19 yang bersifat holistik dan inklusif dengan mendukung transformasi ekonomi yang mengarusutamakan perubahan iklim dan sejalan dengan agenda Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030" *(United Nations Development Programme - UNDP)*

Sehingga bisa disimpulkan bahawa Pemulihan Hijau berupaya untuk menerapkan ekonomi hijau sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam mencapai keuntungan ekonomi dan keseimbangan lingkungan. Inisiatif pemulihan hijau tidak hanya membangkitkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja tetapi juga mengurangi ketergantungan karbon, melindungi ekosistem, dan mengurangi kemiskinan. Inisiatif pemulihan hijau juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan menciptakan lapangan kerja bagi keluarga berpenghasilan menengah dan rendah dan lebih baik untuk lingkungan, terutama mitigasi perubahan iklim dan adaptasi, konservasi ke-anekaragaman hayati, dan kota yang sehat.

2.2 URGENSI PEMULIHAN HIJAU

Meskipun kondisi pandemi telah berlalu, namun pandemi COVID-19 telah memberikan perubahan secara signifikan terhadap tatanan kondisi sosial dan ekonomi dari keadaan sebelumnya. Dalam konteks ekonomi, setidaknya guncangan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 berlangsung dalam tiga runtutan (1) pandemi mendisrupsi ketenagakerjaan dan lapangan kerja, (2) kebijakan restriksi mobilitas masyarakat oleh pemerintah menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, (3) terbatasnya kegiatan perekonomian menyebabkan perlambatan perekonomian secara agregat.

Dalam konteks Indonesia, pandemi COVID-19 bertanggungjawab penuh terhadap resesi perekonomian nasional. Kebijakan pembatasan mobilisasi menyebabkan penerimaan negara mengalami kontraksi secara signifikan, yaitu dari Rp 2.2 ribu triliun di 2019 menjadi Rp 1.8 ribu triliun di 2021. Pandemi juga menyebabkan Indonesia mengalami resesi pada tahun 2020, di mana perekonomian Indonesia tumbuh negatif dalam tiga kuartal berturut-turut. Selama pandemi, defisit APBN melebar dari 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2019 menjadi 6,34% terhadap PDB pada 2020. Dalam skala sektoral, hampir seluruh sektor perekonomian turut mencatatkan pertumbuhan negatif sepanjang Triwulan-II 2020. Pertumbuhan negatif tersebut juga berkorelasi kuat terhadap meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, dan melebarnya ketimpangan antar kelas masyarakat.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan terhambatnya pencapaian negara dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Gambaran mengenai dampak COVID-19 terhadap perlambatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia disajkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Dampak COVID-19 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Dampak COVID
Tanpa kemiskinan	Persentase penduduk miskin meningkat menjadi 2 digit (10,19% pada tahun 2020 dan 10,14% pada tahun 2021)
Tanpa kelaparan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat menjadi 8,34%, melampaui jauh dari target perencanaan 6,2%
Kehidupan sehat dan sejahtera	Meningkatnya risiko kesehatan akibat COVID-19 disertai risiko peningkatan limbah medis
Pendidikan berkualitas	Persentase anak putus sekolah pada jenjang menengah meningkat sebesar 1%
Kesetaraan gender	Menurunnya persentase perempuan yang mengisi posisi manajerial sebesar 1% menjadi 17,83%
Air bersih dan sanitasi layak	Indeks kualitas lahan menurun (59,54) dan berada di bawah target perencanaan (61,6)
Energi bersih dan terjangkau	Terbatasnya pengembangan energi terbarukan
Pekerjaan layan dan pertumbuhan ekonomi	PDB per tenaga kerja tumbuh secara negatif (-1,84%)
Industri, inovasi, dan infrastruktur	PDB industri manufaktur tumbuh secara negatif (-2,93)
Berkurangnya kesenjangan	Meningkatnya rasio gini sebesar 0,005 menjadi 0,385
Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi strategi penanganan bencana yang selaras dengan renstra nasional (35,6%) berada di bawah target perencanaan (36,96%)
Penanganan perubahan iklim	Terhambatnya implementasi program perubahan iklim nasional
Ekosistem lautan	Hilangnya potensi ekonomi laut yang ditandai dengan menurunnya (-2%) proporsi tangkapan jenis ikan laut (64,73%)
Ekosistem daratan	Meningkatnya risiko deforestasi dan konversi lahan hutan untuk kegiatan agrikultur
Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Meningkatnya informasi *hoax* dan konspirasi
Kemitraan untuk mencapai tujuan	Menurunnya jumlah kerjasama *South-South* menjadi 10 program, berada jauh di bawah target perencanaan (86 program)

Sumber: Dashboard SDG Indonesia, data olah LPEM-UI

Mengingat kompleksnya kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, pemulihan hijau diperkenalkan sebagai sebuah *extraordinary instrument* untuk memulihkan kondisi perekonomian ke dalam kondisi yang lebih berkelanjutan.

Implementasi pemulihan hijau dinilai penting karena untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih resilien dibutuhkan praktik pembangunan yang berkelanjutan. Pandemi COVID-19 telah memberikan sinyal bahwa kondisi perekonomian saat ini tidak cukup resilien dan rentan terhadap berbagai risiko dan kebencanaan yang akan datang (*Organization for Economic Co-operation and Development* - OECD, 2020). Apabila pemulihan hijau tidak dilakukan, perbaikan kondisi lingkungan yang terjadi akibat penurunan aktivitas perekonomian seperti penurunan emisi gas rumah kaca dan kualitas udara yang meningkat karena menurunnya mobilitas masyarakat tidak akan berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemulihan hijau juga dikenal sebagai agenda *build back better* yang dimana melakukan pemulihan dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelum pandemi.

Dalam konteks Indonesia, instrumen pemulihan hijau menjadi penting untuk meningkatkan resiliensi perekonomian Indonesia mengingat kondisi perekonomian saat ini tidak menggambarkan kondisi yang berkelanjutan (Kurniawan & Managi, 2018). Selain itu, di dalam dokumen Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (*Low Carbon Development Indonesia*/LCDI), Bappenas (2019) mengestimasikan bahwa pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek berkelanjutan mampu membantu Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari keadaan normal (*Business as Usual*/BaU). Selain itu, pemulihan hijau juga merupakan bagian dari alternatif pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi struktural. Melalui Bappenas, pemerintah Indonesia berinisiasi untuk melakukan transformasi struktural dengan melakukan transisi pertumbuhan ekonomi menuju sektor yang lebih produktif dengan meningkatkan produktivitas pada sektor-sektor yang telah ada. Di dalam enam strategi yang difokuskan untuk mendukung transformasi struktural tersebut, pemulihan hijau merupakan strategi kunci untuk mencapai keberhasilan transformasi struktural ekonomi.

2.3 REGULASI TERKAIT PEMULIHAN HIJAU

Sebagai langkah kongkrit untuk melaksanakan agenda pemulihat hijau, berikut adalah beberapa kebijakan yang dibuat baik di level internasional maupun nasional yang dapat mendukung agenda pemulihan hijau

- *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
- *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs), dimana dalam SDGs terdapat pilar lingkungan yang termuat dalam tujuan 6. Air bersih dan sanitasi, tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penangaan perubahan iklim, 14. Ekosistem laut, dan 15. Ekosistem darat.
- *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada Juli 2021, dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), dalam dokumen tersbeut Indonesia berkomitmen untuk mencapai pengurangan emisi GRK sebanyak 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional.
- Dokumen LTS-LCCR 2050 (*Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience*), merupakan arahan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dimana Indonesia menargetkan *Net-Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dokumen tersebut merupakan strategi jangka panjang yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku *national focal point* untuk *United Nations Climate Change Conference* (UNFCCC) sebagai upaya memenuhi mandat Persetujuan Paris.
- NAWACITA mengamanatkan aksi tentang penguatan sektor kehutanan, serta membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan (RPJPN 2005-2025).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pada Perpres tersebut juga diatur tentang pasar karbon.
- Untuk sektor limbah terdapat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Regulasi tersebut bertujuan mendukungn program stimulus hijau untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibidang persampahan melalui program kredit bergulir.
- Untuk sektor energi terdapat Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Rencana Umum Energi Nasional – RUEN), salah satu isi dari regulasi terkait RUEN adalah membangun energi nasional yang berbasis EBT (Energi Baru Terbarukan) dan menjadikan energi nasional sebagai *economic development drive*.

2.4 PENGGUNAAN KERANGKA PEMULIHAN HIJAU

Kerangka Pemulihan Hijau yang disarankan meliputi empat tahapan, yakni:

a) **Tahap Respon** dengan luaran Peta Pemulihan Hijau;
b) **Tahap Pengembangan Skenario Pemulihan** dengan luaran Penjaminan pendanaan dan Proses pengintegrasian dengan kegiatan pemulihan hijau,
c) **Tahap Implementasi dan evaluasi** dengan luaran Pelaksanaan kegiatan pemulihan hijau pada sektor prioritas, Revisi Peta Jalan Pemulihan Hijau, Revisi RPJM dan Pengembangan metode evaluasi untuk Peta Jalan, dan terakhir
d) **Tahap *Outcome*** dengan luaran Program pemulihan hijau diakui secara formal melalui proses penganggaran pemerintah dan Terjaminnya pendanaan untuk kegiatan pemulihan hijau.

Gambar 2.1 Kerangka Pemulihan Hijau
Sumber: *Green Recovery Roadmap Indonesia 2021-2024, data olah LPEM-UI*

Pada setiap tahapan kerangka pemulihan hijau perlu dilaksanakan sejumlah kegiatan untuk mencapai objektif tertentu sehingga dapat menghasilkan target luaran. Gambaran mengenai objektif yang ingin dicapai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Tahapan Kerangka Pemulihan Hijau

Tahap	Objektif/Target	Luaran
Respon	- Identifikasi dan evaluasi dokumen, strategi, dan kebijakan mengenai COVID-19 dan isu turunannya - Identifikasi dampak COVID-19, khususnya secara sektoral, terhadap isu ekonomi, sosial, dan lingkungan - Menentukan sektor prioritas beserta turunan kegiatannya disertai dengan jangka waktu pelaksanaan - Pemetaan pemangku kepentingan dan inisiatif untuk mendapatkan dukungan lintas pemangku kepentingan - Identifikasi kebutuhan dan sumber pendanaan	Peta jalan pemulihan hijau
Pengembangan skenario pemulihan	- Pengembangan mekanisme teknis untuk kegiatan pemulihan hijau - Penyusunan dan pematangan strategi untuk mendapatkan dukungan dari lintas pemangku kepentingan - Penyusunan strategi untuk mendapatkan pendanaan - Peninjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	- Penjaminan pendanaan - Proses pengintegrasian dengan kegiatan pemulihan hijau
Implementasi dan evaluasi	- Pematangan perencanaan kegiatan pemulihan hijau - Meninjau efektivitas Peta Jalan Pemulihan Hijau dan mempertimbangkan pengembangan inisiasi alternatif - Pengembangan metode untuk mengevaluasi rencana kegiatan pemulihan hijau - Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk merevisi dan mengintegrasikan Peta Jalan Pemulihan Hijau di dalam RPJM	- Pelaksanaan kegiatan pemulihan hijau pada sektor prioritas - Revisi Peta Jalan Pemulihan Hijau - Revisi RPJM - Pengembangan metode evaluasi untuk Peta Jalan
Outcome	- Melanjutkan implementasi kegiatan pemulihan hijau - Melanjutkan koordinasi dengan pemangku kepentingan	- Program pemulihan hijau diakui secara formal melalui proses penganggaran pemerintah - Terjaminnya pendanaan untuk kegiatan pemulihan hijau

Sumber *Green Recovery Roadmap Indonesia 2021-2024, data olah LPEM-UI*

2.5 PENYUSUNAN PETA JALAN PEMULIHAN HIJAU DAERAH

Penyusunan Peta jalan Pemulihan Hijau sebagai luaran pada tahapan Respon memerlukan pelaksanaan sejumlah kegiatan, mulai dari identifikasi strategi dan kebijakan penanganan COVID-19 dan dampak sektoralnya, penentuan sektor prioritas, pemetaan pemangku kepentingan dan potensi dukungan & sumber pendanaan. Untuk tujuan pelaksanaan Monev, perlu dijelaskan khusus mengenai penentuan sektor prioritas dan potensi sumber pendanaan berbasis sektor prioritas agar dapat memandu para pihak dan tidak muncul kesalahan persepsi.

2.5.1 Penentuan sektor prioritas

Multi-criteria Decision Analysis (MCDA) merupakan sebuah metode yang dikembangkan untuk menjawab tujuan maupun keputusan yang ingin dibuat terutama saat menghadapi keputusan yang melibatkan banyak keputusan yang sulit dipilih (Jordan dan Turnpenny, 2015). Analisis MCDA dapat digunakan untuk membuat keputusan dari beberapa pilihan, mengalokasikan sumber daya, dan melakukan analisis skenario (Lootsma, 1999). Dalam beberapa tahun terakhir, beragam pendekatan MCDA telah dikembangkan untuk menjawab berbagai masalah dalam pemilihan tujuan atau keputusan. Teknik MCDA telah banyak diterapkan diberbagai bidang, termasuk dalam aspek lingkungan dan pemulihan ekonomi hijau. Penggunaan metode MCDA dalam menentukan kriteria dan indikator pemulihan ekonomi hijau dapat dilakukan dengan metode peringkat dengan pembobotan. World Bank (2021) melakukan studi untuk membangun strategi pemulihan ekonomi yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan ekonomi melalui pendekatan analisis *multi-criterion* dan *multi-stakeholders*. Gambar di bawah ini menyajikan diagram alur untuk penerapan MCDA dalam pengembangan Peta Jalan Pemulihan Hijau Daerah.

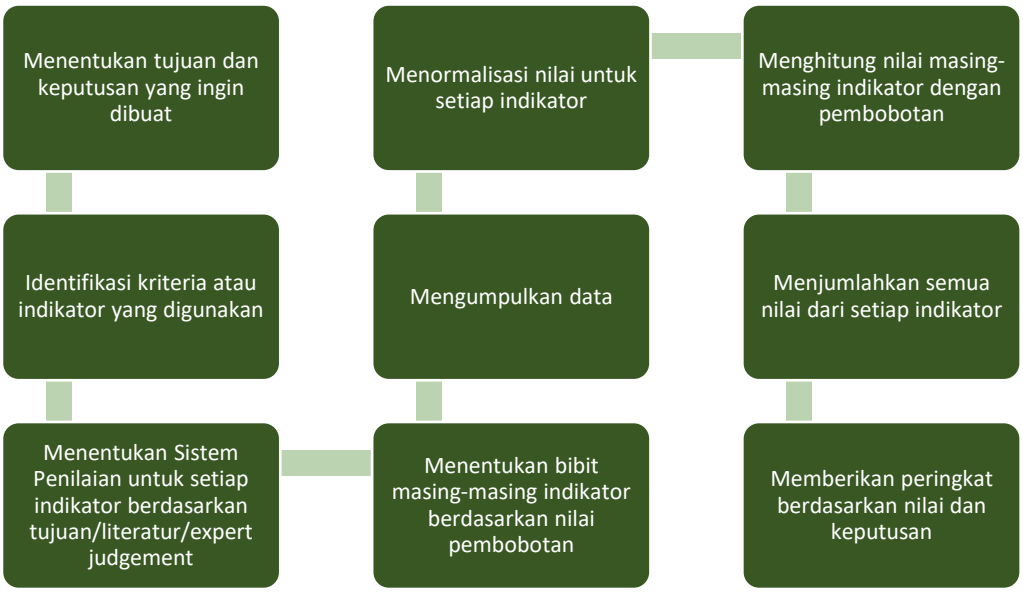

Gambar 2.2 Tahapan Implementasi Multi Criteria Decision Analysis (MCDA)
Sumber LPEM FEB UI (2023)

Indikator yang digunakan dalam menentukan setiap pemilihan sektor prioritas terdiri dari empat indikator yakni indikator ekonomi (angka pengganda Ekonomi), lingkungan (emisi), sosial (kemiskinan), dan opini pemerintah. Khusus untuk opini pemerintah, data-data dari variabel ini didapatkan melalui survei yang diberikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah melihat masa depan dari pertumbuhan ekonomi sektoral di daerah masing-masing. Sementara, pemilihan bobot untuk setiap variabel MCDA dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan masing-masing OPD. Tabel 2.3 di bawah ini merangkum data-data yang digunakan dalam menentukan sektor potensial.

Tabel 2.3 Contoh Indikator dan Variabel dalam Analisis MCDA

No	Indikator	Variabel	Penjelasan	Sumber Data
1	**Ekonomi**	• Angka Pengganda Output • (*Output Multiplier)*	Menggambarkan output perekonomian yang dihasilkan sebagai hasil dari satu rupiah input di sektor	Tabel Input-Output Badan Pusat Statistik (BPS)
		• Angka Pengganda Tenaga Kerja • (*Employment Multiplier*)	enggambarkan total tenaga erja yang dihasilkan sebagai hasil ari satu rupiah tambahan di ektor	Tabel Input-Output BPS
		• Angka Pengganda Nilai Tambah • (*Value Added Multiplier*)	Menggambarkan total Nilai Tambah yang dihasilkan sebagai hasil dari satu rupiah Nilai Tambah di sektor	Tabel Input-Output BPS
		• Tax Ratio[7]	Rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	BPS
2	**Lingkungan**	• Emisi CO2 (karbon dioksida)	Estimasi jumlah emisi CO2 (karbon dioksida) per ton yang dihasilkan oleh sektor	World Input Output Database
		• Emisi CH4 (Metana)	Estimasi jumlah emisi CH4 (Metana) per ton yang dihasilkan oleh sektor	World Input Output Database
		• Emisi Nox (Nitrogen Oksida)	Estimasi jumlah emisi NOX (Nitrogen dioksida) per ton yang dihasilkan oleh sektor	World Input Output Database
3	**Sosial**	Kemiskinan Sektoral	Persentase rumah tangga yang miskin berdasarkan sektor pekerjaan	Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)
4	**Opini Pemerintah Daerah**		Menunjukkan persepsi pemerintah daerah terhadap perkembangan sektor-sektor perekonomian dalam konteks penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau	Hasil Survei

Sumber: LPEM FEB UI (2023)

[7] Data yang digunakan adalah data *tax ratio* level nasional. Hal Ini dilakukan karena data publik tidak tersedia untuk data level provinsi.

Tabel 2.4 merupakan contoh indikator dan bobot di Provinsi Riau. Seperti penjelasan di atas, pemilihan bobot untuk setiap variabel dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan masing-masing OPD yang menjadi dasar untuk menentukan sektor potensial yang akan dianalisis dengan MCDA. Berdasarkan tabel 2.4 indikator lingkungan menjadi indikator dengan bobot tertinggi mencapai 60% dari total bobot secara keseluruhan. Sementara indikator ekonomi hanya memiliki 20%, sedangkan indikator sosial dan opini pemerintah hanya mencapai bobot 10%.

Tabel 2.4 Contoh Indikator dan Bobot untuk Provinsi Riau

No	Indikator	Variabel	Total Bobot
1	**Ekonomi**	• Angka Pengganda Output (*Output Multiplier)*	5%
		• Angka Pengganda Tenaga Kerja (*Employment Multiplier*)	5%
		• Angka Pengganda Nilai Tambah (*Value Added Multiplier*)	5%
		• Tax Ratio	5%
2	**Lingkungan**	• Emisi CO2 (karbon dioksida)	20%
		• Emisi CH4 (Metana)	20%
		• Emisi Nox (Nitrogen Oksida)	20%
3	**Sosial**	• Kemiskinan Sektoral	10%
4	**Opini Pemerintah Daerah**		10%
		Total	**100%**

Sumber LPEM FEB UI (2023)

Setelah mendapatkan bobot tertinggi, indikator tersebut kemudian dipilih sebagai sektor prioritas yang akan dianalisis menggunakan *Multi-criteria Decision Analysis* (MCDA). Berdasarkan contoh Tabel 2.5 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor dengan nilai MCDA tertinggi (0.70). Nilai tersebut menjadikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan potensial untuk dipilih dalam upaya penerapan konsep-konsep pemulihan hijau atau *green recovery*.

Tabel 2.5 Contoh Hasil MCDA Provinsi Riau

Sektor	MCDA	Rank
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.70	1
Sektor Industri Pengolahan	0.58	2
Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	0.54	3
Sektor Pertambangan dan Penggalian	0.45	4
Sektor Keuangan dan Asuransi	0.41	5
Sektor Konstruksi	0.37	6
Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	0.34	7
Sektor Transportasi dan Komunikasi	0.33	8
Sektor Jasa-Jasa (Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Perusahaan)	0.29	9

Sumber LPEM FEB UI (2023)

2.5.2 Potensi Penerimaan dari Sektor Prioritas

Sektor prioritas yang terpilih dijadikan acuan awal untuk menganalisis lebih lanjut strategi kebijakan dan pendanaan yang tepat di daerah untuk mendukung transisi pemulihan hijau. Potensi penerimaan daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan dapat diestimasi dengan mengalikan kenaikan *output*/nilai tambah di sektor potensial dengan *tax multiplier* sektoral di daerah. Selain dampak langsung berupa pembayaran pajak dari sektor unggulan, dampak tidak langsung berupa kenaikan *output*/nilai tambah di sektor lainnya dalam perekonomian ikut serta dalam perhitungan potensi penerimaan pemerintah dengan adanya optimalisasi sektor unggulan untuk pemulihan hijau. Selain estimasi pendapatan pemerintah, strategi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah di bawah agenda pemulihan hijau membutuhkan analisis dukungan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah melalui *meta-analysis* maupun wawancara mendalam dengan *stakeholders*. Pemberian dukungan dapat dijadikan intervensi bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan program pemulihan hijau, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

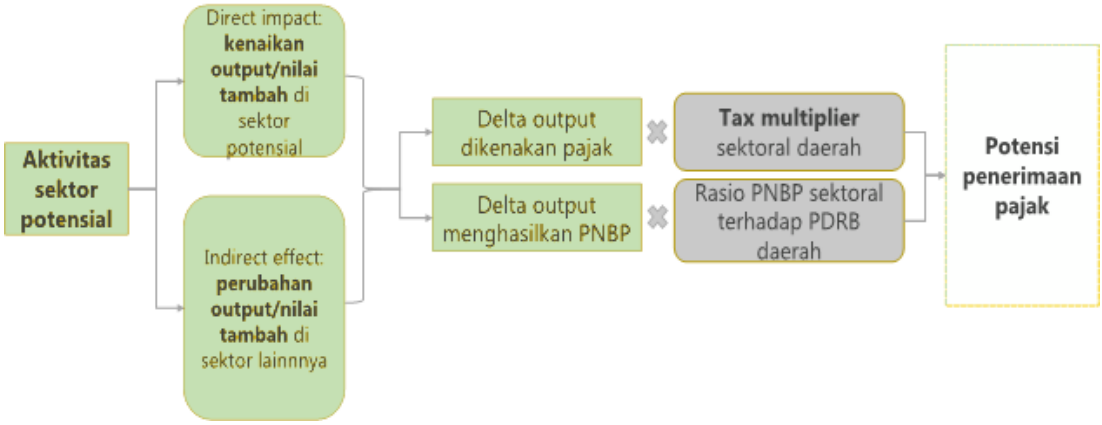

Gambar 2.3 Metode Estimasi Pendapatan Pemerintah Daerah
Sumber LPEM FEB UI (2023)

Secara keseluruhan, potensi penerimaan pajak dapat dihitung dengan mengalikan potensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor potensial dengan *tax multiplier* masing-masing daerah. Adapun *tax multiplier* dapat dihitung dengan membagi antara realisasi total pajak terhadap total PDRB daerah. Pemerintah daerah bahkan dapat menghitung potensi penerimaan fiskal dengan lebih spesifik menggunakan data masing-masing jenis pajak, baik pajak yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga hingga dana transfer dari pemerintah pusat (Transfer ke Daerah).

Mengingat data realisasi pajak berdasarkan sektor yang dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah yang tersedia hanya di tingkat nasional, estimasi indikasi total pendapatan fiskal masing-masing daerah dari sektor potensial yang dihasilkan dari pendekatan MCDA menggunakan rasio penerimaan pajak nasional. Sebagai contoh di Provinsi Riau, estimasi total potensi penerimaan pajak dari peringkat tiga teratas sektor potensial yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, dan listrik, gas, dan air bersih diestimasi dapat mencapai Rp35 triliun. Potensi penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan potensi penerimaan dari tiga sektor kontribusi tertinggi di Provinsi Riau saat ini (Pengolahan, Pertanian, dan Pertambangan) yang mencapai Rp48 triliun. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi penurunan penerimaan pajak saat proses transisi menuju pemulihan ekonomi hijau.

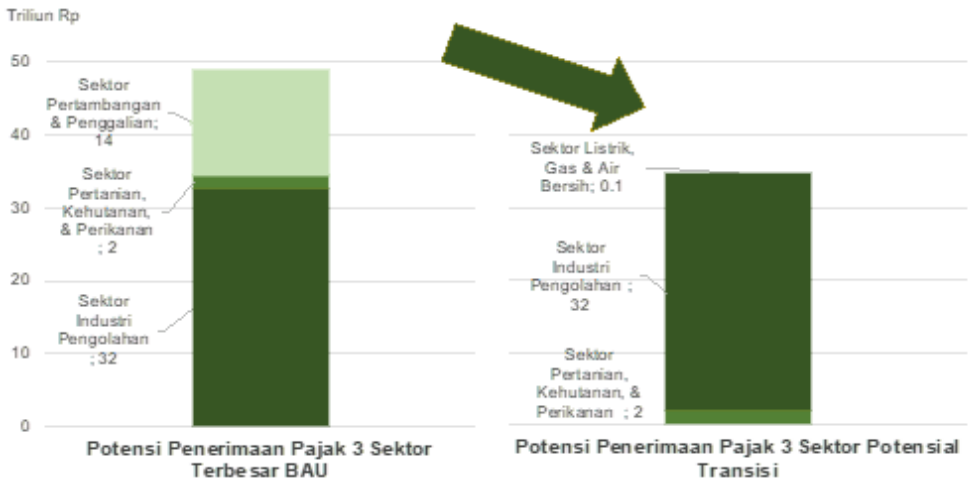

Gambar 2.4 Potensi Tambahan Penerimaan Pajak dari Sektor Potensial di Provinsi Riau Sebelum (BAU) dan Saat Transisi

Sumber Olahan LPEM – UI

2.6 KONTEKS DAERAH PILOTING MONITOR DAN EVALUASI PEMULIHAN HIJAU

Dalam menggunakan kerangka pemulihan hijau, kondisi setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan konteks daerah. Pengguna kerangka monev inisiatif pemulihan hijau di daerah juga perlu memahami kondisi khas di masing-masing daerah. Sebagai landasan untuk mengembangkan diskusi lebih mendalam mengenai kondisi khas di masing-masing daerah, pada bagian berikut akan disampaikan gambaran mengenai konteks daerah *piloting* Monev:

a) Provinsi Riau

Penggunaan kerangka monev inisiatif pemulihan hijau harus melihat kondisi di setiap daerah, hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan pemulihan yang berbeda. Sebagai awalana indikator yang bisa dilihat yaitu; Demografi Daerah, Potensi Risiko Bencana Lingkungan yang sering muncul, Sektor prioritas Gas Rumah Kaca (GRK) yang sudah pernah dilakukan, Kondisi Keuangan Daerah atau kapasitas fiskal daerah dan Kondisi Sosio-ekonomi masyarakat. Kelima indikator tersebut bisa mejadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan skala prioritas. Pada Tabel 2.6 Provinsi Riau secara demografi pada tahun 2018 berjumlah 6.717.612 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.440.034 jiwa dan perempuan 3.277.578 jiwa. Berdasarkan risiko becana lingkungan; banjir dan kebakaran lahan merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Riau. Sedangkan program GRK (Gas Rumah Kaca) yang pernah dilakukan di Provinsi Riau meliputi bidang; Lahan (secara umum; perkebunan dan ternak), Lahan Gambut, Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan, Transportasi, Energi, Industri dan sektor Limbah. Untuk kondisi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2022, Provinsi Riau memiliki Kapasitas Fiskal Daerah mencapai nilai 2,215 atau tinggi dengan total Belanja daerah dalam APBD tahun 2022 mencapai Rp 9,1 triliun. Sedangkan untuk kondisi sosial-ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2011-2018 menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana selama 2011-2015 mengalami tren penurunan, namun pada tahun 2016-2017 kembali mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi produksi barang dan jasa di daerah ini terutama migas.

Tabel 2.6 Konteks Daerah Provinsi Riau

Indikator	Keterangan
a. Demografi	Penduduk Provinsi Riau tahun 2018 berjumlah 6.717.612 orang terdiri dari laki-laki 3.440.034 orang dan perempuan 3.277.578 orang.
b. Risiko Bencana Lingkungan	Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran lahan sehingga berakibat kepada kabut asap. Provinsi Riau disamping rentan terhadap bencana banjir di musim hujan, namun juga rentan terhadap bencana kekeringan di musim kemarau, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. **Bencana banjir** yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan), dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir). **Bencana kebakaran** berdampak pada menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau dan menjadi berbahaya karena selain menganggu kesehatan dan penerbangan, jumlah titik api yang banyak juga menggangu hubungan baik dengan negara tetangga (malaysia) **Bencana gempa bumi** di Provinsi Riau dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan kawasan yaitu kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, menengah, rendah dan sangat rendah.
c. Sektor prioritas GRK (Gas Rumah Kaca)	Kehutanan • Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove • Penelitian dan Pengembangan Kehutanan • Mengurangi konversi lahan hutan untuk kegiatankegiatan lain yang menghasilkan penutupan lahan dengan cadangan karbon yang lebih rendah seperti untuk perkebunan dan pertanian, pemekaran wilayah, pertambangan dan pemukiman. Lahan Gambut: • Mencegah kebakaran lahan gambut dan lahan gambut yang diolah. • Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau drainase pada daerah lahan gambut. Perkebunan • Melakukan teknik tanpa bakar untuk pembukaan lahan (mineral maupun gambut). • Melakukan pemupukan yang tepat. • Tidak mengubah lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter untuk perkebunan. • Pemanfaatan kompos Tandan Kosong Sawit (TKS) sebagai suplement pupuk anorganik (kimia) di perkebunan kelapa sawit. Tanaman Pangan: • Pengembangan pertanian organik • Pemanfaatan lahan gambut terlantar terdegradasi untuk pertanianberkelanjutan melalui tatakelola air dan ameliorasi yangmenurunkan emisi GRK • Tanam padi hemat air dengan sistem pengairan berselang (*intermittent irrigation*) dan *System of Rice Intensification* (SRI) • Pemanfaatan jerami padi untuk pakan ternak diperkaya, Perternakan:

Indikator	Keterangan
	• Penggunaan dan pengembangan pakan ternak renda emisi. • Pengembangan teknologi biogas dan pakan untukmengurangi emisi GRK dari ternak • Penyuluhan dan edukasi. Bidang Transportasi: • Inteligent Transport System (ITS) • Non-Motorized Transpor • Managemen Parkir • Pengadaan sistem BRT • Smart Driving • Peremajaan angkutan umum • Trafic Impact Control (TIC) Energi: • Peningkatan efisiensi penggunaan energi di rumah tangga dan industri • Pembangunan pembangkit listrik yang rendah emisi yang menggunakan energi tidak dan rendah emisi, untuk pembangunan • Pemanfaatan biogas untuk rumah tangga Bidang Industri: • Kelompok I yaitu aksi – aksi mitigasi yang telah di tetapkan oleh nasional padaPP No. 61 Tahun 2011 dimana Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang harus menjalankannya. • Kelompok II adalah penggantian bahan bakar solar menjadi bahan bakar bakar biomassa • Kelompok III adalah menggunakan bahan bakar yang tidak mengeluarkan emisi, • Kelompok IV yaitu melakukan konservasi energi pada semua komponen industri dan komersial yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya • Kelompok V adalah penggunaan mesin dan teknologi yang lebih canggih lagi yang tidak mengelurkan emisi. Bidang Limbah: • Mitigasi 1 yaitu minimalisasi sampah dengan berbagai kegiatan serta peningkatan prasarana dan sarana komposting sampah organik yang tidak terangkut di perkotaan • Komposting sampah organik di pedesaan dengan sistem gali timbun dan komposting di TPST (3R)
d. Kapasitas Fiskal Daerah T.A 2022	Provinsi Riau memiliki nilai Kapasitas Fiskal senilai 2,215 atau tinggi
e. Sosio-ekonomi	Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2011-2018 menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana selama 2011-2015 mengalami tren penurunan, namun pada tahun 2016-2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,68% dengan migas. Apabila melihat kondisi per tahun terjadi fluktuasi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi produksi barang dan jasa di daerah ini terutama migas yang mengalami penurunan harga hingga 70% dan kondisi ini elah menyebabkan tidak berjalannya investasi pada sektor migas. Akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi provinsi Riau dari tahun 2011-2018 sangat ditunjang oleh sektor lainnya.

Sumber: data diolah FITRA

b) Provinsi Jawa Barat

Pada Tabel 2.7 Provinsi Jawa Barat secara demografi pada tahun 2019 mencapai 49.316.712 jiwa atau ekuivalen dengan 18,40 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dimana laki-laki berjumlah 24.962.701 jiwa dan perempuan berjumlah 24.354.011 jiwa. Berdasarkan risiko becana lingkungan, Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman bencana alam, salah satunya adalah gempa bumi, bencana banjir dan rawan bencana tsunami, terutama terjadi di Palabuhan Ratu (Kabupaten Sukabumi), Pangandaran (Kabupaten Pangandaran), dan Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan program GRK yang pernah dilakukan di Provinsi Jawa Barat meliputi bidang; Lahan seperti Kehutanan, Pertanian dan Peternakan, bidang Energi, bidang Transportasi dan bidang berbasis Limbah. Untuk kondisi keuangan daerah berdasarkan PMK Kementerian Keuangan tahun 2022, Provinsi Jawa Barat memiliki Kapasitas Fiskal Daerah senilai 2,546 atau Sangat Tinggi dengan total Belanja daerah dalam APBD tahun 2022 mencapai Rp 32,9 triliun. Sedangkan untuk kondisi sosial-ekonomi, selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan. Perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar -2,76 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,54 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,48 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,54 persen.

Tabel 2.7 Konteks Daerah Provinsi Jawa Barat

Indikator	Keterangan
a. Demografis	Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2019 mencapai 49.316.712 jiwa atau ekuivalen dengan 18,40 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan sex ratio sebesar 102,50. Dimana laki-laki berjumlah 24.962.701 jiwa dan perempuan berjumlah 24.354.011 jiwa.
b. Risiko Bencana Lingkungan	Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam, salah satunya adalah **gempa bumi**. Hal ini di karenakan Jawa barat memiliki 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di Selatan Jawa Barat. Jawa Barat juga merupakan kawasan **rawan bencana banjir**, dimana Kawasan banjir tersebut terkonsentrasi di Pesisir Pantai Utara Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan DAS Cipunagara), Cekungan Bandung (DAS Citarum), dan Kabupaten Ciamis (DAS Citanduy). Terakhir, Jawa Barat juga merupakan daerah dengan **Rawan bencana tsunami**, terutama terjadi di Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), Pangandaran (Kabupaten Pangandaran), dan Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan peta kawasan rawan bencana tsunami, terdapat 3 (tiga) tingkat kerawanan yakni rendah (26,5 persen), menengah (34,5 persen), dan tinggi (40 persen). Tsunami umumnya disebabkan oleh gempa bumi dasar laut.
c. Sektor prioritas GRK (Gas Rumah Kaca)	Bidang Berbasis Lahan (Kehutanan): - Penanaman Kawasan Hutan Maupun Area Lain - Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Kebun Bibit Raya - Rehabilitasi Mangrove - Persemaian Bidang Berbasis Lahan (Pertanian dan Peternakan): - Penggunaan Pupuk Organik - Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Indikator	Keterangan
	- Varietas Padi Rendah Emisi Bidang Berbasis Energi: - Pengembangan EBT – Off Grid - Pengembangan EBT – On Grid - Substitusi Bahan Bakar Fosil ke Biogas Bidang Transportasi - ITS/ATCS - BRT System - Peremajaan Armada Transportasi Umum - Car Free Day (CFD) - Penerapan Manajemen Parkir Bidang Berbasis Limbah: - Persampahan dan Air Limbah - Pembangunan TPS 3R/TPST, Bank Sampah dan TPA - Operasional Bank Sampah - Operasional TPS 3R/TPST - Pembangunan SPALD-T dan SPALD-S - Komposting di TPK Sarimukti
d. Kapasitas Fiskal Daerah T.A 2022	Provinsi Jawa Barat memiliki nilai Kapasitas Fiskal senilai 2,546 atau Sangat Tinggi
e. Sosio-ekonomi	Selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan. Perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar -2,76 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,54 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,48 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,54 persen.

Sumber data diolah FITRA

c) Provinsi Sulawesi Tengah

Pada Tabel 2.8 Provinsi Sulawesi Tengah secara demografi sejak periode 2014-2018 cenderung meningkat, yakni dari 2.831.283 jiwa pada Tahun 2014 menjadi 3.010.440 jiwa pada Tahun 2018. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 1.536.490 dan perempuan sebanyak 1.473.950 jiwa. Berdasarkan risiko becana lingkungan; Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar wilayahnya termasuk kategori Kawasan/Zona Rawan Bencana, antara lain bencana letusan gunung berapi, yaitu di wilayah Gunung Colo yang terletak di Pulau Unauna Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong, berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali. Selain itu provinsi Sulteng juga rawan Tanah Longsor dan bencana Likufaksi. Dimana tanah longsor berpotensi terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan Kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu. Sedangkan program GRK yang pernah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi bidang; Hutan, pertanian dan peternakan, enegri, trasportasi dan limbah. Untuk kondisi keuangan daerah berdasarkan PMK Kementerian Keuangan tahun 2022, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Kapasitas Fiskal Daerah senilai 1,311 atau Sangat Rendah dengan total Belanja daerah dalam APBD tahun 2022 mencapai Rp 4,8 Triliun. Sedangkan perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah masih menunjukkan kinerja yang positif yakni pada triwulan III 2018 tumbuh 6,46% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 6,20% (yoy). Dari sisi penawaran, kenaikan pertumbuhan didorong meningkatnya pertumbuhan di Sektor Industri. Pengolahan, yang berimbas pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai penyedia input (raw material). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang relatif tinggi di beberapa tahun terakhir, secara struktural juga diikuti dengan proses transformasi. Dimana, pangsa Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2013 hanya 5,67%, sudah mencapai 12.09% saat ini. Sementara, pangsa Sektor Pertanian menurun dari 34.36% pada 2013 menjadi 28.75%. Dari sisi ketenagakerjaan, proses transformasi sektor tersebut juga diikuti penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi di Sektor Industri Pengolahan. Pada Tahun 2013 hanya sebesar 5,04%, kini sudah mencapai 7,57%.

Tabel 2.8 Konteks Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator	Keterangan
a. Demografi	Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2014-2018 cenderung meningkat, yakni dari 2.831.283 jiwa pada Tahun 2014 menjadi 3.010.440 jiwa pada Tahun 2018. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 1.536.490 dan perempuan sebanyak 1.473.950.
b. Risiko Bencana Lingkungan	Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar wilayahnya termasuk kategori Kawasan/Zona Rawan Bencana, antara lain bencana letusan gunung berapi, yaitu di wilayah Gunung Colo yang terletak di Pulau Unauna Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong, berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali. Selain itu provinsi Sulteng juga **rawan Tanah Longsor dan bencana Likufaksi**. Dimana tanah longsor berpotensi terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan Kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu.
c. Sektor prioritas GRK (Gas Rumah Kaca)	Bidang Berbasis Lahan (Kehutanan): - Penanaman Kawasan Hutan - Rehabilitasi Hutan dan Lahan - mencegah degradasi hutan, Bidang Berbasis Lahan (Pertanian dan Peternakan): - Penggunaan Pupuk Organik

Indikator	Keterangan
	- Menjaga wilayah DAS - mengembalikan bahan organik pada tanah-tanah pertanian Bidang Berbasis Energi: - Pengembangan EBT - Substitusi Bahan Bakar Fosil ke Biogas - Pemanfaatan biogas untuk rumah tangga - Penyusunan kebijakan tentang panas bumi dan air tanah Bidang Transportasi - Peremajaan Armada Transportasi Umum - Car Free Day (CFD) - Penerapan Manajemen Parkir Bidang Berbasis Limbah: - Persampahan dan Air Limbah - Operasional Bank Sampah
d. Kapasitas Fiskal Daerah T.A 2022	Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Kapasitas Fiskal Daerah senilai 1,311 atau Sangat Rendah
e. Sosio-ekonomi	Perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah masih menunjukkan kinerja yang positif yakni pada triwulan III 2018 tumbuh 6,46% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 6,20% (yoy). Dari sisi penawaran, kenaikan pertumbuhan didorong meningkatnya pertumbuhan di Sektor Industri Pengolahan, yang berimbas pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai penyedia input (raw material). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang relatif tinggi di beberapa tahun terakhir, secara struktural juga diikuti dengan proses transformasi. Dimana, pangsa Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2013 hanya 5,67%, sudah mencapai 12.09% saat ini. Sementara, pangsa Sektor Pertanian menurun dari 34.36% pada 2013 menjadi 28.75%. Dari sisi ketenagakerjaan, proses transformasi sektor tersebut juga diikuti penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi di Sektor Industri Pengolahan. Pada Tahun 2013 hanya sebesar 5,04%, kini sudah mencapai 7,57%.

Sumber data diolah FITRA

d) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pada Tabel 2.9 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara demografi pada tahun 2013 sampai tahun 2017, jumlah penduduk NTB menunjukkan trend meningkat yang umumnya disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2017 berjumlah 4.955.578 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2.405.080 jiwa dan perempuan sebanyak 2.550.498 jiwa. Berdasarkan risiko becana lingkungan; Provinsi NTB memiliki resiko bencana alam seperti Tanah Longsor, Gunung Berapi, Tsunami, Angin Topan, Gelombang Pasang, dan Tanah Kekering. Sedangkan program GRK yang pernah dilakukan di Provinsi NTB meliputi bidang; Pertanian, kehutanan, energi dan transportasi. Untuk kondisi keuangan daerah berdasarkan PMK Kementerian Keuangan tahun 2022, Provinsi NTB memiliki Kapasitas Fiskal Daerah senilai 1,465 atau Rendah dengan total Belanja daerah dalam APBD tahun 2022 mencapai Rp 5,6 Triliun. Sedangkan untuk kondisi sosial-ekonomi, Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang cenderung lebih stabil dan menunjukan tren yang meningkat, sedangkan partumbuhan ekonomi dengan tambang menunjukan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tiga tahun terakhir terus menurun. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 paling rendah berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara sedangkan yang paling tinggi di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 2.9 Konteks Daerah Provinsi NTB

Indikator	Keterangan
a. Demografi	Tahun 2013 sampai 2017, jumlah penduduk NTB menunjukkan trend meningkat yang umumnya disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 (data diolah), jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2017 berjumlah 4.955.578 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2.405.080 jiwa dan perempuan sebanyak 2.550.498 jiwa.
b. Risiko Bencana Lingkungan	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki resiko bencana alam seperti Tanah Longsor, Gunung Berapi, Tsunami, Angin Topan, Gelombang Pasang, dan Tanah Kekering. **Kawasan tanah longsong** terdapat di Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab dan Kota Bima. **Kawasan gunung berapi** terdapat di kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab Dompu, Kab Bima, Kota Bima. **Kawasan rawan Tsunami** terdapat di Kab Lombok Barat, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur, Kab Sumbawa Barat, Kab Sumbawa, Kab Dompu, Kota Bima dan Kab Bima. **Kawasan Rawan Angin Topan** terdapat di Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat, Kab Sumbawa, Kab Dompu, dan Kab Bima. **Kawasan Rawan Gelombang Pasang** terdapat di Kota Mataram, Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara. Kab Lombok tengah, Kab Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat, Kab Sumbawa, Kab Dompu, Kab Bima dan Kota Bima. **Kawasan Rawan Tanah Kekering** terdapat di Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur, Kab Sumbawa Barat, Kab Sumbawa, Kab Dompu, Kota Bima dan Kab Bima.
c. Sektor prioritas GRK (Gas Rumah Kaca)	Sektor Pertania; - Meningkatkan karbon yang di-sequester (diambil dari udara untuk disimpan dalam tubuh tanaman/tanah). - mengembalikan bahan organik pada tanah-tanah pertanian - pengurangan pembakaran limbah pertanian, - penerapan sistem usaha tani tanpa/sedikit penggenangan, - pemupukan berimbang, - menjaga kualitas air irigasi Sektor Kehutanan; - pelesatian hutan - mencegah degradasi hutan, - mencegah alih fungsi hutan - penanaman kembali hutan yang terdegradasi - pengurangan emisi gas rumah kaca pada wilayah DAS

Indikator	Keterangan
	Sektor Energi - Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan - Pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG (*Liquified Petroleum Gas*) secara penuh - Pemanfaatan biogas untuk rumah tangga - Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi - Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi - Penyusunan kebijakan tentang panas bumi dan air tanah - Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi Sektor Transportasi: - Pengembangan Pengendalian Analisis Dampak Lalu Lintas/TIC - Peremajaan Armada Angkutan Umum - Membangun Non-Motorized Transport/NMT (Pedestrian dan Jalur Sepeda) - Campaign Education at School - Penerapan Manajemen Parkir - Penerapan Congestion Charging dan Road Pricing - Pelatihan dan Sosialisasi Eco Driving - Pengadaan Sistem BRT/semi-BRT - Pemasangan Converter Kit pada Angkutan Umum - Menaikkan Uang Muka Kredit Sepeda Motor dan Pajak Progresif Kendaraan Pribadi - Car Free Day dan Menutup Transportasi Bermotor di Pusat Keramaian
d. Kapasitas Fiskal Daerah T.A 2022	Provinsi NTB memiliki Kapasitas Fiskal Daerah senilai 1,465 atau Rendah
e. Sosio-ekonomi	Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang cenderung lebih stabil dan menunjukan tren yang meningkat, sedangkan partumbuhan ekonomi dengan tambang menunjukan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tiga tahun terakhir terus menurun. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 paling rendah berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara sedangkan yang paling tinggi di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Sumber data diolah FITRA

BAB III
KERANGKA MONITORING DAN EVALUASI PEMULIHAN HIJAU DAERAH

3.1 OPERASIONALISASI KERANGKA MONITOR DAN EVALUASI PEMULIHAN HIJAU DI DAERAH

Kerangka yang dikembangkan untuk melaksanakan Monev terhadap implementasi insiatif pemulihan hijau daerah disusun dengan sistematika berikut, Pertama, menentukan tujuan Monitoring dan evaluasi. Langkah kedua, menentukan dimensi implementasi pemulihan hijau yang akan dimonev. Langkah ketiga, menetapkan definisi operasional yang dimaksud dengan kegiatan Monev pada setiap dimensi sehingga dapat memandu sekaligus membatasi definisi sehingga dapat mengurangi bias, dan selanjutnya yang keempat, menetapkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi pemulihan hijau pada setiap dimensi.

Setelah dimensi, definisi operasional dan indikator ditetapkan, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka analisis terkait indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk menilai implementasi pemulihan hijau daerah.

Gambar 3.1 Sistematika Operasionalisasi Kerangka Monev Pemulihan Hijau

Dengan sistematika tersebut, ditetapkan empat dimensi yang akan menjadi fokus pelaksanaan Monev, yakni Kebijakan; Proses; *Output*; dan *Outcome*.

3.1.1 Kebijakan

Monitoring dan Evaluasi terhadap Kebijakan didefinisikan sebagai sejauhmana kebijakan pemulihan hijau relevan dengan konteks, peluang dan tantangan pada masing-masing daerah dan kejelasan rumusan strategi pemulihan hijau. Indikator atau operasionalisasi konsepnya meliputi:

- Proses identifikasi isu dan agenda pemulihan hijau relevan dengan konteks daerah
- Peta jalan pemulihan hijau diprioritaskan pada sektor unggulan
- Adanya daftar kegiatan pemulihan hijau untuk masing-masing sektor prioritas
- Adanya mekanisme teknis untuk pengembangan kegiatan pemulihan hijau
- Adanya strategi mendapatkan dukungan lintas stakeholders
- Adanya hasil identifikasi kebutuhan pendanaan pemulihan hijau
- Adanya strategi pengembangan pendanaan publik dan non-publik

3.1.2 Proses

Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses didefinisikan sebagai tingkat transparansi dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan, dan konsistensi antara kebijakan, perencanaan dan anggaran pemulihan hijau. Indikator atau operasionalisasi konsepnya meliputi:

- Keterbukaan informasi kebijakan, perencanaan dan anggaran pemulihan hijau
- Adanya wahana partisipasi penyusunan kebijakan perencanaan dan anggaran pemulihan hijau, termasuk keterlibatan kelompok rentan (perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dsb)
- Tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan anggaran pemulihan hijau
- Tingkat konsistensi antara kebijakan, perencanaan dan anggaran

3.1.3 Output

Monitoring dan Evaluasi terhadap *Output* didefinisikan sebagai tingkat capaian *Output* kegiatan pemulihan hijau pada sektor prioritas, capaian pendanaan dan dukungan stakeholders. Indikator atau operasionalisasi konsepnya meliputi:

- Progress capaian *output* kegiatan pemulihan hijau per triwulan (gap antara target *output* dan realisasi dalam dokumen)
- Progress capaian pendanaan public dan non public
- Progress capaian dukungan stakeholders dalam implementasi Pemulihan Hijau
- Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemulihan hijau

3.1.4 Outcome

Monitoring dan Evaluasi terhadap *Outcome* didefinisikan sebagai tingkat capaian hasil kegiatan pemulihan hijau pada sektor prioritas. Indikator atau operasionalisasi konsepnya meliputi:

- Progress capaian *outcome* kegiatan pemulihan hijau per tahun (gap antara target *outcome* dan realisasi dalam dokumen)
- Kontribusi kegiatan pemulihan hijau terhadap nilai emisi sektoral; dengan mempertimbangkan share terhadap PDRB sektoral dan penyerapan tenaga kerja sektoral
- Penerima manfaat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dsb

Gambaran operasionalisasi kerangka Monev pemulihan hijau disajikan secara lengkap pada bagian berikut:

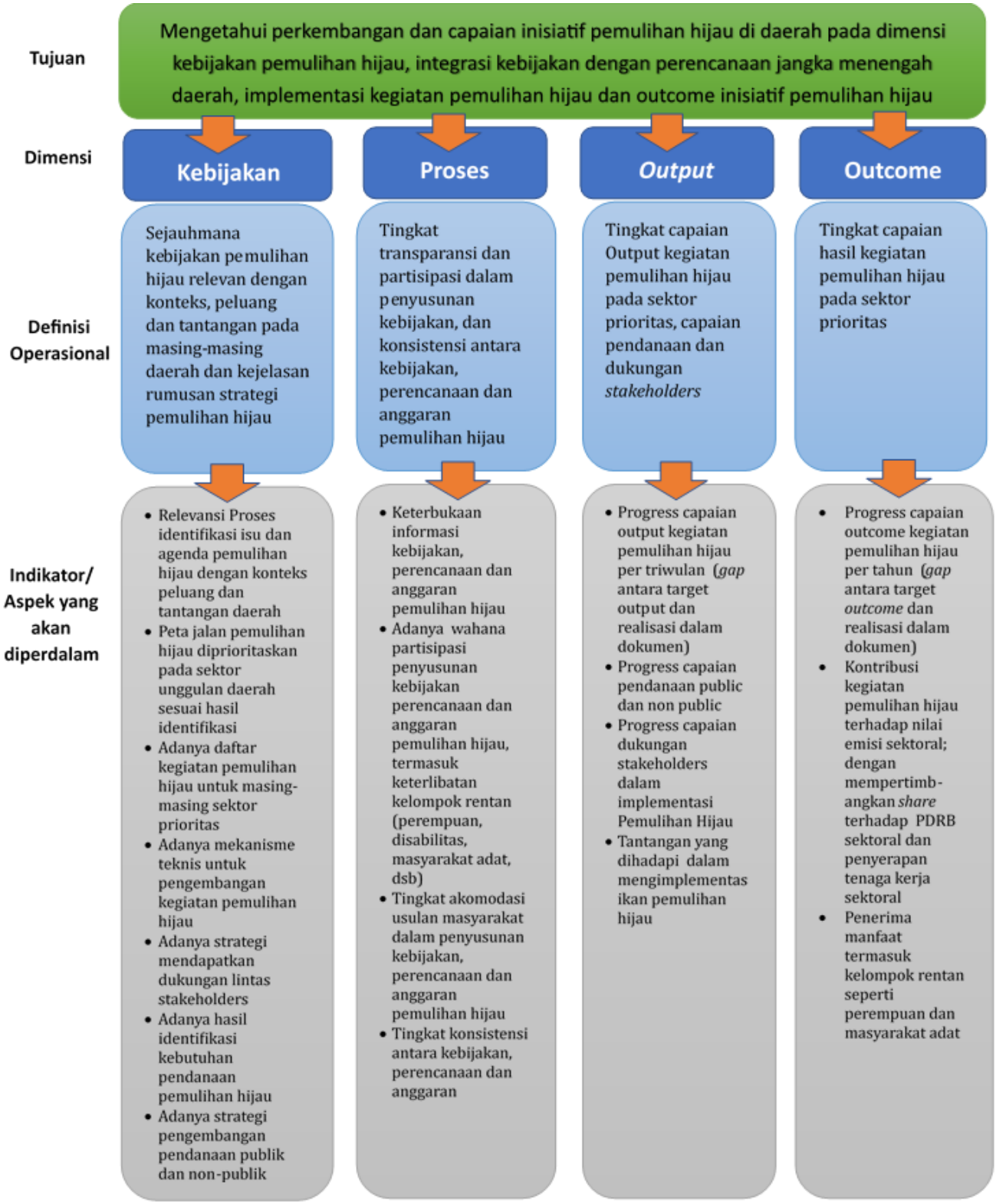

Gambar 3.2 Bagan Kerangka Monev Pemulihan Hijau daerah

3.2 KERANGKA ANALISIS MONEV PEMULIHAN HIJAU

Bagian pokok dari kerangka analisis meliputi dua bagian, yakni pertanyaan pendalaman untuk setiap indikator (jika dibutuhkan) dan teknik analisis. Teknik analisis dapat merupakan rangkaian langkah yang harus ditempuh untuk melakukan analisis, dan pada bagian lain dapat berupa kriteria terukur yang digunakan untuk menilai implementasi. Hal ini sangat bergantung pada teknik pengumpulan data/informasi yang digunakan.

Secara keseluruhan kerangka analisis meliputi Pertanyaan pendalaman terhadap indikator, teknik pengumpulan data/informasi, teknik analisis, data/informasi analisis, dan sumber data/nara sumber. **Kerangka Analisis lengkap terlampir.**

Dalam kerangka analisis yang disusun juga telah diberikan saran mengenai tekni-teknik yang bisa digunakan dalam melakukan pengumpulan data/informasi dalam mengukur implementasi pemulihan hijau. Resume mengenai teknik utama pengumpulan data/informasi ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Resume teknik utama pengumpulan data/informasi

Dimensi	Teknik Pengumpulan data/informasi
Dimensi Kebijakan	
Proses identifikasi isu dan agenda PH	Wawancara dan desk study
Kejelasan Strategi	Desk study
Dimensi Proses	
Transparansi	Score card (alternatif uji akses oleh OMS)
Partisipasi	Score card
Konsistensi Kebijakan-Perencanaan-Anggaran	Desk study
Dimensi Output	
Progress	Desk study
Tantangan implementasi PH	Wawancara
Dimensi Outcome	
Progress dan Kontribusi	Desk study
Penerima manfaat	Wawancara

Desk study adalah kerja mengumpulkan data/informasi melalui studi dokumen yang relevan. Dalam praktek pelaksanaan Monev implementasi pemulihan hijau di daerah, desk study akan dilaksanakan oleh tim Monev yang dibentuk dari berbagai unsur.

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dengan informan kunci yang berkaitan dengan implementasi pemulihan hijau di daerah. Informan kunci yang diwawancarai dapat berasal dari stakeholders inisiatif pemulihan hijau di daerah maupun dalam bagian yang lebih khusus, wawancara dengan actor-aktor dalam lingkup yang lebih sektoral sesuai sector prioritas (unggulan) masing-masing daerah. Untuk itu tim pelaksana Monev perlu mempersiapkan instrument berupa draft pertanyaan wawancara bersifat terbuka, sesuai aspek yang akan diperdalam dan konteks masing-masing daerah.

Score card adalah sebuah alat untuk melakukan penilaian berdasarkan pengalaman praktis peserta selama berdinamika dengan implementasi pemulihan hijau di daerah. Pelaku penilaian score board sesuai cluster kelompoknya (misal OPD Pemda, Organisasi masyarakat sipil atau komunitas) dapat diundang dalam satu pertemuan untuk melakukan penilaian bersama, atau bisa dilakukan secara terpisah.

Uji Akses Dokumen adalah teknik melakukan penilaian terhadap tingkat keterbukaan informasi berdasarkan tahapan permohonan informasi kepada Badan Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.3 TAHAPAN DAN KERANGKA WAKTU MONEV PEMULIHAN HIJAU

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi pemulihan hijau di daerah dilaksanakan dalam dua tahapan, pertama, Tahap Persiapan, dan Kedua, Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap persiapan, kegiatan utama yang dilaksanakan adalah Lokakarya menyepakati kerangka Monev, yang diawali dengan identifikasi aspek yang akan dimonev dan dilanjutkan dengan penyiapan rancangan kerangka Monev.

Sementara pada Tahap Pelaksanaan, terbagi atas dua babak, dimana pada setiap babak ada dua kegiatan utama yang dilaksanakan, yakni (1) Pelaksanaan Monev, dan (2) *Interface meeting*. Babak pertama difokuskan untuk melaksanakan Monev untuk dimensi Kegiatan dan Proses, sementara babak kedua Monev akan fokus pada dimensi *Output* dan *Outcome* implementasi pemulihan hijau.

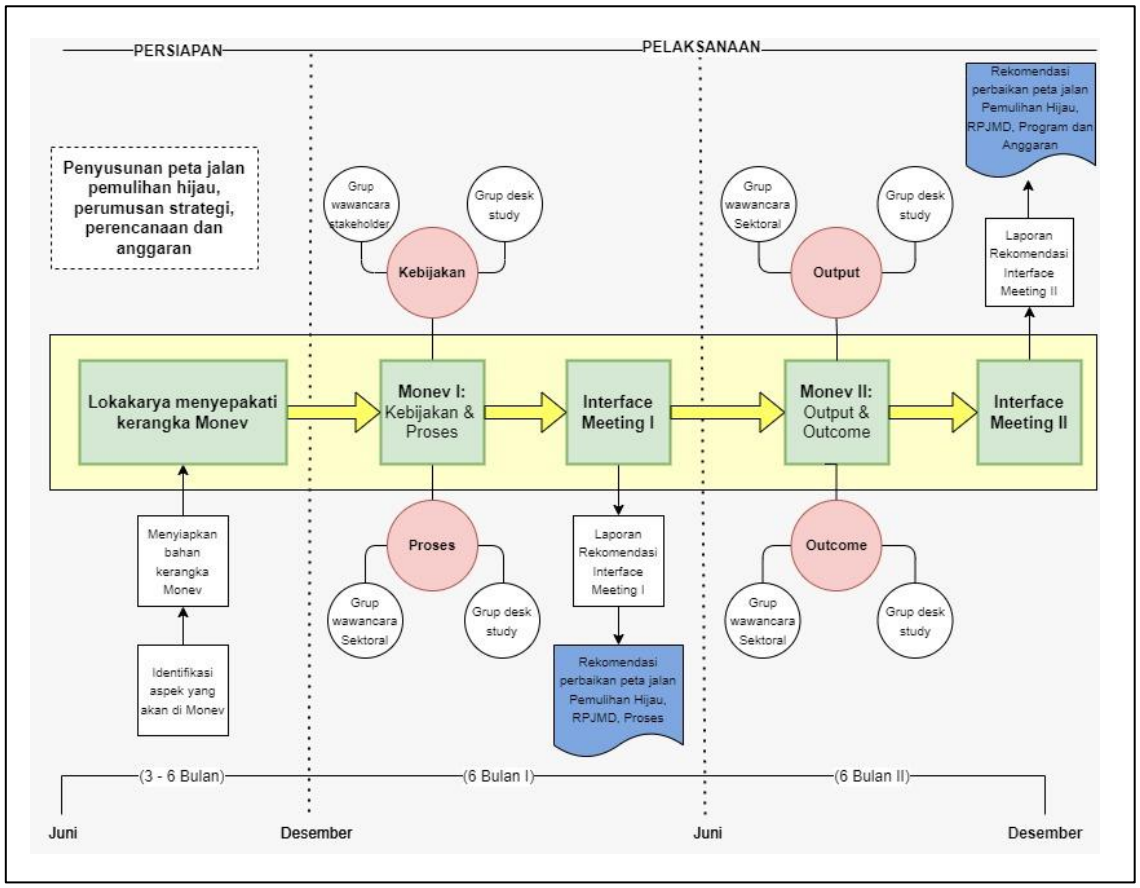

Gambar 3.3 Bagan Tahapan kegiatan Monev Pemulihan Hijau daerah

Tahap persiapan kerangka Monev dilaksanakan selama tiga hingga paling lambat enam bulan pada tahun anggaran sebelumnya (n-1) sebelum implementasi pemulihan hijau dilaksanakan. Sehingga, jika kegiatan pemulihan hijau dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, maka persiapan dilakukan pada triwulan III hingga triwulan IV tahun anggaran 2022. Diasumsikan, dokumen rencana pemulihan hijau daerah juga mulai disusun dan disepakati pada kurun waktu tersebut (semester II tahun anggaran 2022). Adapun kegiatan Monev dilaksanakan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember).

Tabel 3.2 Kerangka Waktu Monev Pemulihan Hijau Daerah

No	Kegiatan	Kerangka waktu
1	Identifikasi aspek yang akan dimonev	3 s.d 6 bulan
2	Penyiapan bahan Kerangka Monev	
3	Lokakarya untuk menyepakati Kerangka Monev	
4	Monev I Kebijakan dan Proses	6 bulan
5	Interface Meeting I	
6	Monev II Output dan Outcome	6 bulan
7	Interface Meeting II	

3.4 PANDUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMULIHAN HIJAU

3.4.1 Tahap Persiapan

Persiapan Monev bisa dilaksanakan paralel dengan kegiatan formulasi isu dan agenda pemulihan hijau, atau paling tidak saat penyusunan kebijakan hingga perencanaan sedang berproses. Pendek kata, persiapan pelaksanaan monev bisa dimulai setelah ada kepastian untuk melaksanakan agenda pemulihan hijau yakni dengan mulai disusunnya kebijakan berupa peta jalan pemulihan hijau daerah. Tahap persiapan butuh waktu tiga hingga maksimal enam bulan.

1) Penyiapan rancangan Kerangka Monev

Untuk memulai persiapan Monev pemulihan hijau, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rancangan Kerangka Monev. Hal ini bisa dimulai dengan melakukan identifikasi mengenai cakupan dan aspek-aspek yang yang akan di-monev. Proses identifikasi ini bisa dilakukan oleh tim pemrakarsa dari OPD Pemda bersama OMS melalui sebuah diskusi dalam tim kecil yang diberi tugas untuk hal tersebut. Karena kegiatan Monev ini merupakan upaya untuk memastikan dijalankannya tahapan-tahapan dalam Kerangka Kerja Pemulihan Hijau (FITRA-LPEM FEE UI, 2023), maka Kerangka Kerja Pemulihan Hijau harus menjadi pegangan utama dalam menyiapkan rancangan Kerangka Monev.

Setelah cakupan dan aspek yang akan di-Monev disepakati, dilanjutkan dengan membentuk tim yang bertugas menyusun rancangan kerangka monev. Rancangan kerangka monev meliputi cakupan monev, aspek-aspek yang perlu di-monev, dan Kerangka Analisis. Setelah bahan-bahan ini siap, selanjutnya akan dibahas bersama dalam lokakarya.

2) Lokakarya untuk menyepakati Agenda dan Kerangka Monev

Lokakarya diselenggarakan oleh Pemda bekerjasama dengan OMS setempat. Peserta yang diundang dalam lokakarya meliputi segenap stakeholders yang relevan dengan kegiatan pemulihan hijau di daerah baik dari jajaran pimpinan Pemda, OPD sektoral terkait, OMS, sektor swasta, dan kelompok masyarakat terkait sesuai kondisi di masing-masing daerah. Jumlah peserta menyesuaikan dngan kondisi dan kebutuhan setempat.

Lokakarya ditujukan untuk mengembangkan agenda bersama untuk melaksanakan Monev inisiatif Pemulihan Hijau dan membangun kesepakatan di antara

stakeholders di daerah mengenai cakupan monev, aspek-aspek yang akan diperdalam dalam monev dan kerangka analisis yang akan digunakan dalam pelaksanaan monev.

Dalam lokakarya juga dapat disepakati mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan monev, pihak-pihak yang terlibat dan pembagian peran. Pendekatan pelaksanaan monev bisa saja disepakati untuk dilaksanakan bersama dengan membentuk tim monev terpadu yang melibatkan setiap stakeholders pemulihan hijau. Tim monev terpadu ini nantinya akan melaksanakan monev untuk setiap tahapan kegiatan monev dan mempresentasikan hasil monev kepada seluruh stakeholders.

Alternatif lainnya bisa dengan berbagi tugas, misalnya satu bagian topik monev dilaksanakan oleh Pemda, sementara bagian lainnya oleh OMS dan sektor swasta, pada saatnya setiap tim yang sudah dimandatkan untuk melaksanakan bagian monev mempresentasikan hasilnya kepada stakeholders. Pendekatan berbeda yang dapat ditempuh adalah setiap pihak melaksanakan monev sendiri-sendiri untuk setiap bagian monev dan akan mempresentasikan hasilnya kepada *stakeholders*, sesuai topik monev.

Fasilitator lokakarya sebelumnya diharapkan telah menyiapkan Rancangan Kerangka Monev, yang terdiri atas dimensi Monev, Aspek yang akan diperdalam, dan Kerangka Analisis. Contoh Dimensi dan Aspek yang diperdalam dalam Monev, serta kerangka analisis lengkap disajikan pada bagian sebelumnya.

Tabel 3.3 Contoh Kerangka Analisis untuk Dimensi Proses

Indikator/Aspek yang diperdalam	Pertanyaan pendalaman	Teknik Pengumpulan data/informasi	Teknik analisis	Data/informasi analisis	Sumber data	Nara sumber
Keterbukaan informasi kebijakan, perencanaan dan anggaran pemulihan hijau	1) Sejauhmana akses untuk mendapatkan dokumen Peta jalan, dokumen RPJMD, Renja, DPA OPD sektoral PH 2) Sejauhmana ketersediaan dan kejelasan informasinya	Score Card OPD, OMS, Komunitas, Sektor Swasta **Alternatif untuk OMS** uji akses dokumen Desk study	Scoring 1- 5 Kriteria: Nilai 1 Tidak lengkap Nilai 2 Kurang lengkap Nilai 3 cukup Nilai 4 Lengkap Nilai 5 Sangat Lengkap Menganalisis ketersediaan dan kejelasan informasi (triwulan dan semester)	Hasil Scoring oleh peserta score card berdasarkan pengalaman masing-masing Dokumen kebjakan, perencanaan dan anggaran	- • Bappeda • OPD sektoral (menyesuaikan prioritas masing-masing daerah) Bappeda	-
Adanya wahana partisipasi penyusunan kebijakan perencanaan dan anggaran pemulihan hijau, termasuk keterlibatan kelompok rentan (perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dsb)	1) Tingkat keterlibatan stakeholders, khususnya kelompok rentan dalam penyusunan peta jalan PH 2) Tingkat keterlibatan stakeholders, khususnya kelompok rentan dalam Perencanaan PH (RPJMD) 3) Tingkat keterlibatan	Score Card OPD, OMS, Komunitas, Sektor Swasta	Scoring 1- 5 Kriteria: Nilai 1 0-20% Nilai 2 21%-40% Nilai 3 41%-60% Nilai 4 61%-80% Nilai 5 81 %-100%	Hasil Scoring oleh peserta score card berdasarkan pengalaman masing-masing	-	-

Indikator/Aspek yang diperdalam	Pertanyaan pendalaman	Teknik Pengumpulan data/informasi	Teknik analisis	Data/informasi analisis	Sumber data	Nara sumber
	stakeholders, khususnya kelompok rentan dalam penyusunan Program dan anggaran sectoral					
Tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan anggaran pemulihan hijau	Tidak diperlukan	Score Card OPD, OMS, Komunitas, Sektor Swasta	Scoring 1- 5 Kriteria: Nilai 1 0-20% Nilai 2 21%-40% Nilai 3 41%-60% Nilai 4 61%-80% Nilai 5 81 %-100%	Hasil Scoring oleh peserta score card berdasarkan pengalaman masing-masing	-	-
		Alternatf Desk study	Analisis dokumen usulan dan dokumen perencanaan	• Proposal Usulan • DPA OPD sektoral • Data demografis	• Bappeda • OPD sektoral (menyesuaikan prioritas masing-masing daerah)	-
Tingkat konsistensi antara kebijakan, perencanaan dan anggaran	Tidak diperlukan	Desk study	Analisis Konsistensi dokumen Peta jalan PH, RPJMD, Renja, DPA OPD Sektoral	• Dokumen Peta Jalan PH • RPJMD (integrasi) • Renja OPD Sektoral (Penyesuaian) • DPA OPD Sektoral (Penyesuaian)	• Bappeda • OPD sektoral (menyesuaikan prioritas masing-masing daerah)	-

Bahan substantif yang dihasilkan dari pelaksanaan lokakarya, antara lain (a) Bagan Alur Pikir Monev (Dimensi dan Aspek yang akan diperdalam); (b) Kerangka Analisis; dan (c) Daftar kebutuhan instrumen pengumpulan data dan analisis yang perlu disediakan. Sementara hasil lainnya adalah kesepakatan mengenai jadwal, pihak yang terlibat, pembagian peran dalam melakukan Monev dan teknis penugasan dan pembiayaannya. Sebagai tambahan, jika kegiatan Monev akan dilaksanakan, maka setiap pihak punya tugas untuk menyusun instrumen pengumpulan data dan analisis sesuai pembagian peran melaksanakan Monev.

3.4.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan monev akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, yang dibagi dalam dua babak atau dalam dua semester.

3) Pelaksanaan Monev I Kebijakan dan Proses

Monev I dilaksanakan pada tiga bulan pertama setelah seluruh kegiatan penyusunan kebijakan peta jalan pemulihan hijau dan pross perencanaan dan anggaran telah dilaksanakan, atau parallel dengan dimulainya kegiatan .

Fokus Monev I adalah untuk memantau dimensi Kebijakan dan Proses. Monev dilaksanakan menggunakan Kerangka Monev yang telah disepakati bersama dalam Lokakarya, khususnya pada Dimensi Kebijakan dan Proses. Teknik pengumpulan data/informasi dan teknik analisis telah disusun dalam Kerangka Analisis, sehingga rencana pelaksanaan Monev tinggal mengacu pada dokumen tersebut. Untuk Monev I, teknik pengumpulan data/informasi untuk dimensi Kebijakan adalah melalui desk study dan wawancara (sektoral). Sementara untuk dimensi Proses, teknik pengumpulan data/informasi yang digunakan adalah score card dan desk study.

Skema pelaksanaan Monev I dapat dikembangkan dalam dua Gugus Monev, yakni (1) Monev Kebijakan, dan (2) Monev Proses. Gugus Monev Kebijakan, terdiri atas dua grup yakni grup wawancara sektoral dan grup desk study; sementara Gugus Monev Proses, juga terdiri atas dua grup kerja, yakni grup score card dan grup desk study. Score card dilaksanakan untuk setiap kelompok stakeholders secara terpisah, untuk kelompok komunitas, OMS, sektor swasta dan Pemda. Frekuensi dan sebaran wilayah Score card sangat bergantung pada kondisi setempat. Sementara Grup Desk study melaksanakan pengumpulan data/informasi berdasar instrument yang telah disusun. Segera setelah pelaksanaan Monev I, laporan pelaksanaan Monev diharapkan telah disusun oleh setiap Gugus Monev dan siap dipresentasikan dalam pertemuan multipihak yang dihadiri oleh semua stakeholders pemulihan hijau di masing-masing daerah.

4) Pertemuan Multipihak *Interface meeting I*

Interfaee meeting mempertemukan seluruh stakeholders untuk mendiskusikan seluruh temuan hasil monev Keebijakan dan Proses Inisiatif Pemulihan Hijau di daerah. Laporan atau hasil score card dan analisis akan dipaparkan oleh masing-masing gugus monev untuk memperoleh tanggapan dan kesepakatan. Forum ini juga menjadi media untuk melakukan pendalaman mengenai proses formulasi dan penyusunan kebijakan pemulihan hijau dan integrasinya dalam perencanaan daerah, serta kondisi transparansi, partisipasi dan konsistensi kebijakan dengan perencanaan dan anggaran.

Forum ini diselenggarakan oleh Pemda bekerjasama dengan OMS. Keluaran utama yang dihasilkan dari Interface meeting adalah berkembangnya dialog kebijakan di antara para stakeholders kebijakan di daerah, memperoleh pendalaman mengenai proses-proses kebijakan, perencanaan dan anggaran pemulihan hijau yang telah berlangsung dan mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan peta jalan pemulihan hijau, dokumen perencanaan jangka meenegah daerah (RPJMD) dan proses penyusunannya.

Rekomendasi yang dddihasilkan dari Interface meeting kemudian menjadi input untuk perbaikan peta jalan hijau dan RPJMD daerah. Dengan diperolehnya rekomendasi tersebut, dalam jangka pendek dokumen kebijakan peta jalan pemulihan hijau dapat diperbaiki, ddiikuti dengna persiapan untuk peerbaikan RPJMD.

5) Pelaksanaan Monev II *Output* dan *Outcome*

Monev II dilaksanakan untuk dimensi *Output* dan *Outcome*, pada sejumlah aspek yang telah ditetapkan untuk diperdalam. Monev ke II dilaksanakan pada saat kegiatan pemulihan hijau sedang berjalan atau setelah kegiatan selesai.

Merujuk Teknik pengumpulan data/informasi sesuai kerangka analisis, maka Gugus Monev *Output* terbagi atas kerja desk study dan wawancara sektoral, sama dengan Gugus Monev *Outcome*.

6) Pertemuan Multipihak *Interface meeting II*

Interface meeting II adalah rangkaian terakhir dari pelaksanaan kegiatan Monev. Forum ini memberikan perhatian pada keseluruhan dimensi monev yang telah dilaksanakan pada dua kali Monev, baik pada Monev I maupun Monev II. Dengan melakukannya, gambaran menyeluruh evaluasi terhadap proses kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan inisiatif pemulihan hijau dapat diperoleh.

Kegiatan yang mengumpulkan semua stakeholders baik Pemda, OMS, sktor swasta, dan komunitas ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan kebijakan pemulihan hijau, proses penyusunannya serta perencanaan dan penganggaran.

***

SUMBER DOKUMEN

Dokumen APBN 2020-2023.

Dokumen PDF Bahan Kemen PPN/Bappenas RI *Green Recovery Roadmap Indonesia 2021–2024, Building Back Better Low Carbon Development Post-Covid19*.

Laporan Kerangka Pemulihan Hijau Daerah, LPEM-UI 2023.

Ringkasan eksekutif, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. 2018. http://greengrowth.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/20160510161543.Roadmap_Executive-_Summary_ID.pdf

Strategi Implementasi NDC (*Nationally Determined Contribution*), Oktober 2017.

LAMPIRAN

Kerangka Analisis Monitoring dan Evaluasi Inisiatif Pemulihan Hijau Daerah

Dimensi Kebijakan

Indikator/Aspek yang diperdalam	Pertanyaan pendalaman	Teknik Pengumpulan data/informasi	Teknik analisis	Data/informasi analisis	Sumber data	Nara sumber
Proses identifikasi isu dan agenda pemulihan hijau relevan dengan konteks daerah	1) Apakah sudah ada evaluasi strategi dan dampak COVID19/bencana lainnya 2) Apakah sudah meninjau aspek pendanaan 3) Apakah sudah menentukan sektor prioritas?	• Desk study • Wawancara peserta pertemuan penyusunan peta jalan PH	• Memeriksa dokumen/ kertas kerja penyusunan peta jalan PH • Memeriksa bagian dokumen Peta jalan PH yang mengulas mengenai topik tersebut • Membuat catatan temuan proses identifikasi isu dan agenda	• Dokumen/kertas kerja penyusunan peta jalan pemulihan hijau daerah • Dokumen Peta jalan pemulihan hijau daerah	• Bappeda • Dinas LHK • Bappenda • BKAD	• Tim Penyusun Peta jalan PH daerah • Peserta pertemuan penyusunan Peta jalan PH (OPD Pemda, OMS, Pokmas/komunitas, Sektor swasta),
Peta jalan pemulihan hijau diprioritaskan pada sektor unggulan	Tidak diperlukan	Desk study	• Memeriksa bagian dokumen Peta jalan PH yang mengulas mengenai topik tersebut • Menganalisis ketersediaan dan kejelasan informasi yang disajikan • Membuat catatan mengenai ketersediaan dan kejelasan seluruh informasi yang disajikan	Dokumen Peta jalan pemulihan hijau daerah	Bappeda	-
Adanya daftar kegiatan pemulihan hijau untuk masing-masing sektor prioritas	Tidak diperlukan					
Adanya mekanisme teknis untuk pengembangan kegiatan pemulihan hijau	Tidak diperlukan					
Adanya strategi mendapatkan dukungan lintas stakeholders	Tidak diperlukan					
Adanya hasil identifikasi kebutuhan pendanaan pemulihan hijau	Tidak diperlukan					
Adanya strategi pengembangan pendanaan publik dan non-publik	Tidak diperlukan					

Dimensi Proses

Indikator/Aspek yang diperdalam	Pertanyaan pendalaman	Teknik Pengumpulan data/informasi	Teknik analisis	Data/informasi analisis	Sumber data	Narasumber
Keterbukaan informasi kebijakan, perencanaan dan anggaran pemulihan hijau	3) Sejauhmana akses untuk mendapatkan dokumen Peta jalan, dokumen RPJMD, Renja, DPA OPD sektoral PH	Score Card OPD, OMS, Komunitas, Sektor Swasta **Alternatif untuk OMS** uji akses dokumen	Scoring 1- 5 Kriteria: Nilai 1 Tidak lengkap Nilai 2 Kurang lengkap Nilai 3 cukup Nilai 4 Lengkap Nilai 5 Sangat Lengkap	Hasil Scoring oleh peserta score card berdasarkan pengalaman masing-masing	- • Bappeda • OPD sektoral (menyesuaikan prioritas masing-masing daerah)	-
	4) Sejauhmana ketersediaan dan kejelasan informasinya	Desk study	Menganalisis ketersediaan dan kejelasan informasi (triwulan dan semester)	Dokumen kebjakan, perencanaan dan anggaran	Bappeda	
Adanya wahana partisipasi penyusunan kebijakan perencanaan dan anggaran pemulihan hijau, termasuk keterlibatan kelompok rentan (perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dsb)	4) Tingkat keterlibatan stakeholders, khususnya kelompok rentan dalam penyusunan peta jalan PH 5) Tingkat keterlibatan stakeholders, khususnya kelompok rentan dalam Perencanaan PH (RPJMD) 6) Tingkat keterlibatan stakeholders, khususnya kelompok rentan dalam penyusunan Program dan anggaran sectoral	Score Card OPD, OMS, Komunitas, Sektor Swasta	Scoring 1- 5 Kriteria: Nilai 1 0-20% Nilai 2 21%-40% Nilai 3 41%-60% Nilai 4 61%-80% Nilai 5 81 %- 100%	Hasil Scoring oleh peserta score card berdasarkan pengalaman masing-masing	-	-
Tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam penyusunan	Tidak diperlukan	Score Card OPD, OMS, Komunitas, Sektor Swasta	Scoring 1- 5 Kriteria:	Hasil Scoring oleh peserta score card berdasarkan	-	-

Indikator/Aspek yang diperdalam	Pertanyaan pendalaman	Teknik Pengumpulan data/informasi	Teknik analisis	Data/informasi analisis	Sumber data	Narasumber
kebijakan, perencanaan dan anggaran pemulihan hijau			Nilai 1 0-20% Nilai 2 21%-40% Nilai 3 41%-60% Nilai 4 61%-80% Nilai 5 81 %- 100%	pengalaman masing-masing		
		Alternatf Desk study	Analisis dokumen usulan dan dokumen perencanaan	• Proposal Usulan • DPA OPD sektoral • Data demografis	• Bappeda • OPD sektoral (menyesuaikan prioritas masing-masing daerah)	-
Tingkat konsistensi antara kebijakan, perencanaan dan anggaran	Tidak diperlukan	Desk study	Analisis Konsistensi dokumen Peta jalan PH, RPJMD, Renja, DPA OPD Sektoral	• Dokumen Peta Jalan PH • RPJMD (integrasi) • Renja OPD Sektoral (Penyesuaian) • DPA OPD Sektoral (Penyesuaian)	• Bappeda • OPD sektoral (menyesuaikan prioritas masing-masing daerah)	-

Dimensi Output

Indikator/Aspek yang diperdalam	Pertanyaan pendalaman	Teknik Pengumpulan data/informasi	Teknik analisis	Data/informasi analisis	Sumber data	Narasumber
Progress capaian output kegiatan pemulihan hijau per triwulan (gap antara target output dan realisasi dalam dokumen)	1. Berapa persen serapan anggaran PH per triwulan 2. Berapa persen realisasi fisik per tri wulan kegiatan pemulihan hijau?	Desk study	1. Pemerikasaan dokumen laporan kegiatan dan keuangan 2. Membandingkan antara target dan realisasi berdasarkan dokumen perencanaan anggaran	• Dokumen perencanaan kegiatan • Dokumen Laporan realisasi keuangan	• Bappeda • BPKAD • DLH • Disbunak • DESDM • Dinas Pertanian dan Hotikulutra • Dinas Kehutanan	-
Progress capaian dukungan stakeholders dalam implementasi Pemulihan Hijau	1. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam implementasi PH 2. Bagaimana bentuk dukungan masing-masing stakeholder	FGD Studi Media	Mencatat data dan informasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam proses FGD dan hasil tracking media	Dokumen/Kertas Kerja masing-masing stakeholders	Media massa mainstream	PJ kegiatan masing-masing stakeholder
Progress capaian pendanaan public dan non public	1. Berapa persen capaian pendanaan public 2. Berapa persen capaian pendanaan non publik	Desk study	• Memeriksa dokumen laporan kegiatan dan keuangan semua pihak yang melaksanakan kegiatan PH • Menganalisis data terkait pendanaan (publik dan non-publik)	Laporan keuangan masing-masing pihak	Bagian keuangan masing-masing pihak), meliputi: • OPD terkait • LSM • PT • Dunia usaha • Media • Dunia Usaha	-
Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemulihan hijau	Tidak diperlukan	1. Wawancara/ FGD OPD, OMS, Sektor Swasta pada sampel sektor atau diperdalam dalam interface meeting 2. Tracking hasil kajian 3. Tracking media	1. Mengidentifikasi masalah dan tantangan 2. Menganalisis masalah dan tantangan 3. Merumuskan rekomendasi	• Laporan hasil wawancara/FGD • Dokumen hasil kajian • Hasil Tracking media	• OPD terkait • OMS • PT • Media • Dunia Usaha	PJ Kegiatan masing pihak

Dimensi Outcome

Indikator/Aspek yang diperdalam	Pertanyaan pendalaman	Teknik Pengumpulan data/informasi	Teknik analisis	Data/informasi analisis	Sumber data	Narasumber
Progress capaian outcome kegiatan pemulihan hijau per tahun (gap antara target outcome dan realisasi dalam dokumen)	Tidak diperlukan	Desk study	Membandingkan target realisasi capaian outcome peta jalan, RPJMD dan realisasi laporan kegiatan PH	• Peta jalan PH daerah • RPJMD • Laporan kegiatan PH daerah	• Bappeda • OPD sektoral	
Kontribusi kegiatan pemulihan hijau terhadap nilai emisi sektoral; dengan mempertimbangkan share terhadap PDRB sektoral dan penyerapan tenaga kerja sektoral	Tidak diperlukan	Desk study	• Mengidentifikasi kontribusi kegiatan pemulihan hijau terhadap nilai emisi sektoral • Mengidentifikasi kontribusi kegiatan terhadap PDRB Sektoral • Mengidentifikasi kontribusi kegiatan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral	Laporan kegiatan PH pada bagian outcome	• Bappeda • OPD sektoral	
Penerima manfaat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dsb	Tidak diperlukan	• Desk study • Wawancara OPD, OMS, Komunitas pada sampel sektor	• Mengidentifikasi penerima manfaat (khususnya kelompok rentan) di masing-masing sektor yang menjadi sampel • Jenis manfaat yang diterima	• Laporan Akhir kegiatan PH • Laporan masing-masing OPD sektoral	• Bappeda • OPD sektoral	• OPD sektoral • OMS • Komunitas pada sektor sampel

GREEN RECOVERY

SEKNAS FITRA

Komplek Bumi Sarinah Estate Blok D1,
Jalan Cikoko Barat, Pancoran Jakarta Selatan, 12770
sekretariat@seknasfitra.org
(021) 26966005